BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

OPD | KABAG HUKUM

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

OPD | KABAG HUKUM

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

OPD | KABAG HUKUM

27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
33. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

OPD | KABAG HUKUM

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

OPD | KABAG HUKUM

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 8 Nomor 2008);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 9);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

OPD | BAGIAN HUKUM

51. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

1.	Pendapatan		
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	50.471.541.308,65
	b. Dana Perimbangan	Rp	854.830.511.647,00
	c. Lain – lain Pendapatan yang sah	Rp	218.887.296.649,42
	Jumlah Pendapatan	Rp	1.124.189.349.605,07
2.	Belanja		
	a. Belanja Tidak Langsung		
	1. Belanja Pegawai	Rp	340.802.447.516,00
	2. Belanja Bunga	Rp	0,00
	3. Belanja Subsidi	Rp	509.850.600,00
	4. Belanja Hibah	Rp	12.017.536.500,00
	5. Belanja Bantuan Sosial	Rp	150.000.000,00
	6. Belanja Bagi Hasil	Rp	1.107.019.500,00
	7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	168.299.570.212,00
	8. Belanja Tidak Terduga	Rp	1.453.972.240,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	524.340.396.568,00
	b. Belanja Langsung		
	1. Belanja Pegawai	Rp	59.139.109.897,20
	2. Belanja Barang dan Jasa	Rp	236.063.494.332,00
	3. Belanja Modal	Rp	290.210.246.282,46
	Jumlah Belanja Langsung	Rp	585.412.850.511,66
	Jumlah Belanja	Rp	1.109.753.247.079,66
	Surplus/ (Defisit)	Rp	14.436.102.525,41
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan	Rp	27.576.853.952,81
	b. Pengeluaran	Rp	1.500.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	26.076.853.952,81
	SiLPA tahun berkenaan	Rp	40.512.956.478,22

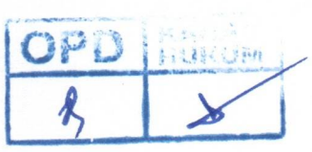

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkp	
5	B.Pembangunan	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal, 17 Juli 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal, 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 45

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
1	2	3	4	5	6
3	**PEMBIAYAAN**				
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**27.586.782.352,81**	**27.576.853.952,81**	**99,96**	**83.235.274.347,11**
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	27.586.782.352,81	27.576.853.952,81	99,96	83.235.274.347,11
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**27.586.782.352,81**	**27.576.853.952,81**	**99,96**	**83.235.274.347,11**
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**100,00**	**2.400.000.000,00**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	2.400.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**100,00**	**2.400.000.000,00**
	Pembiayaan Neto	**26.086.782.352,81**	**26.076.853.952,81**	**99,96**	**80.835.274.347,11**
3.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan**		**40.512.956.478,22**		**27.586.782.352,81**

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	B. Pembangunan	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
1	2	3	4	5	6
3.1.1.4	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	52.947.315.288,05	52.937.387.888,05	99,98	143.230.694.412,24
3.1.1.4.1	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	25.279.056.409,00	25.279.056.409,00	100,00	112.059.384.207,00
3.1.1.4.2	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	2.751.340.338,00	2.751.340.338,00	100,00	2.055.441.942,00
3.1.1.4.3	Belanja Barang dan Jasa	14.614.506.548,30	14.604.579.148,30	99,93	18.562.232.504,00
3.1.1.4.4	Belanja Modal	5.312.531.517,88	5.312.531.517,88	100,00	6.642.478.928,42
3.1.1.4.5	Belanja Hibah	3.501.175.363,00	3.501.175.363,00	100,00	2.793.277.946,00
3.1.1.4.6	Belanja Bagi Hasil	51.854.200,00	51.854.200,00	100,00	50.219.000,00
3.1.1.4.7	Belanja Bantuan Keuangan	837.284.000,00	837.284.000,00	100,00	817.283.000,00
3.1.1.4.8	Belanja Tidak Terduga	599.566.911,87	599.566.911,87	100,00	174.260.374,82
3.1.1.4.9	Akibat Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00	76.116.510,00
3.1.2	**Pencairan Dana Cadangan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.3	**Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.4	**Penerimaan Pinjaman Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.5	**Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.6	**Penerimaan Piutang Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**27.586.782.352,81**	**27.576.853.952,81**	**99,96**	**83.235.274.347,11**
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**100,00**	**2.400.000.000,00**
3.2.1	**Pembentukan Dana Cadangan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.2.2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**100,00**	**2.400.000.000,00**
3.1.1.1	Badan usaha milik daerah (BUMD)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	2.400.000.000,00
3.1.1.1.1	PT. Bank Lampung	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00
3.1.1.1.2	Penyertaan pada BPRS	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
3.1.1.1.3	PDAM " Limau Kunci "				900.000.000,00
3.2.3	**Pembayaran Pokok Hutang**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.2.4	**Pemberian Pinjaman Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.2.5	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**100,00**	**2.400.000.000,00**
3.2.6	**Pembiayaan Neto**	**26.086.782.352,81**	**26.076.853.952,81**	**99,96**	**80.835.274.347,11**
3.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan**		**40.512.956.478,22**		**27.586.782.352,81**

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA KAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	Bpkd	
5	B. Pembangunan	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.37.07.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**12.584.000,00**	**12.584.000,00**	**0,00**	**100,00**	
2.05.2.05.01.37.07.5.2.2.11.08.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.584.000,00	12.584.000,00	0,00	100,00	
2.05.2.05.01.37.07.5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	
2.05.2.05.01.37.07.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
2.05.2.05.01.37.07.5.2.2.13.03.	Belanja tas	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
2.05.2.05.01.37.07.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**16.800.000,00**	**16.790.000,00**	**(10.000,00)**	**99,94**	
2.05.2.05.01.37.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.05.2.05.01.37.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90	
2.05.2.05.01.37.07.5.2.2.15.05.	Belanja Transportasi	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
2.05.2.05.01.37.07.5.2.2.28.	**Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber**	**20.400.000,00**	**20.400.000,00**	**0,00**	**100,00**	
2.05.2.05.01.37.07.5.2.2.28.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**71.340.000,00**	**71.430.000,00**	**90.000,00**	**100,13**	
	JUMLAH BELANJA	**7.466.486.135,00**	**7.268.116.944,00**	**(198.369.191,00)**	**97,34**	
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(7.395.146.135,00)**	**(7.196.686.944,00)**	**198.459.191,00**	**97,32**	
	JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN	**1.143.216.494.247,76**	**1.124.189.349.605,07**	**(19.027.144.642,69)**	**98,34**	
	JUMLAH KESELURUHAN BELANJA	**1.169.303.276.600,57**	**1.109.753.247.079,66**	**(59.550.029.520,91)**	**94,91**	
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(26.086.782.352,81)**	**14.436.102.525,41**	**40.522.884.878,22**	**(55,34)**	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAHAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	Bpkp	
5	B. Pembangunan	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS